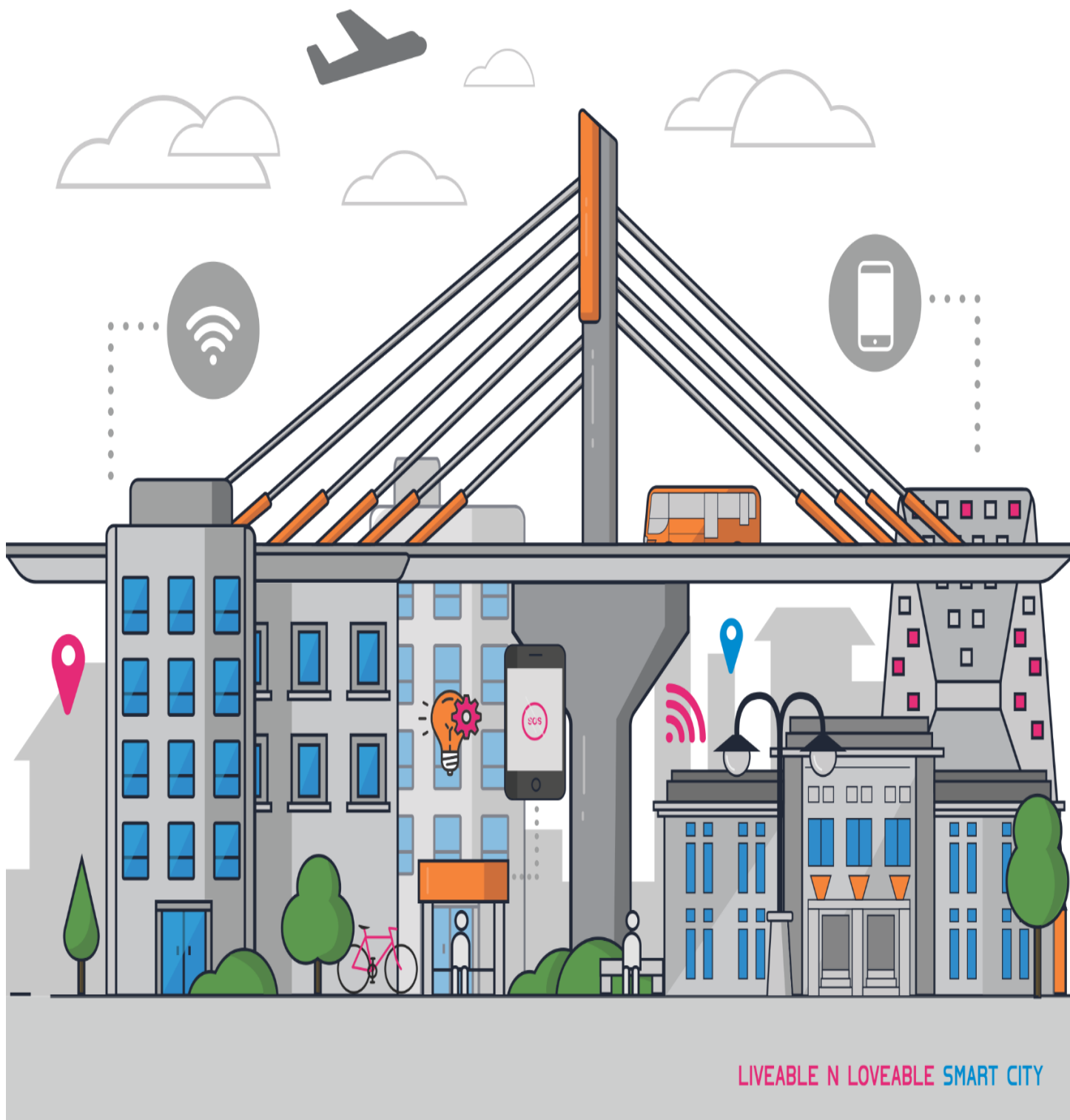


RENCANA KERJA REVISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025



Jl. Wastukencana No.2 Bandung
Tlp.022-4234892,email diskominfo@bandung.go.id

KATA PENGANTAR

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, khususnya dalam rencana tahunan. Disusunlah Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini juga memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Bandung Tahun 2025.

Buku Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna, bertanggung jawab serta untuk lebih memanfaatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.

Namun demikian kita menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu didalam implementasinya diharapkan bukan hanya mengacu kepada rencana tahunan ini, tetapi juga mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat.

Bandung, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197311271993031003

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Lampiran Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 dan Capaian Renstra.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	45
BAB V PENUTUP	49

Lampiran-lampiran Tabel

Halaman

Tabel 2.1	15
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 (tahun berjalan) Kota Bandung	
Tabel 2.2.....	25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung	
Tabel 2.3.....	30
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Bandung	
Tabel 3.1.....	45
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Sebelum Revisi	
Tabel 3.2.....	45
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 Sesudah Revisi	
Tabel 4.1.....	48
Rumusan Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bandung	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya era globalisasi yang berlangsung cepat dan momentum implementasi kebijakan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka telah terjadi perubahan yang signifikan, baik dalam tatanan maupun system Pemerintahan kita, terutama terlihat dalam perubahan paradigma, pemahaman konsep dan implementasi penyelenggaraan Pemerintahan.

Perubahan Undang-undang Otonomi Daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempertegas kembali bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung percepatan implementasi kebijakan Otonomi Daerah, peran serta setiap Instansi Pemerintah Daerah sangat penting dan akan sangat menentukan pelaksanaan Otonomi di daerah, sebab dalam rangka Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang sangat luas, untuk mengatur urusan rumah tangganya. Dengan demikian setiap organisasi Pemerintah Daerah harus melaksanakan teknis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah memegang peranan yang sangat strategis, yang harus dioptimalkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kota Bandung untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat yang sama

masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan daerah.

Disamping itu pula penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pada Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yakni: Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa perangkat daerah harus menyusun Renstra, Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 126 Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Selanjutnya Rencana Kerja yang disusun menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran/ DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasan langsungnya, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja. Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga staf dan *advisory* adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian, berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Selain itu berfungsi melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik, dan Persandian; yang meliputi; Perencanaan komunikasi, diseminasi informasi, teknologi informasi, Persandian (Keamanan Aplikasi); melaksanakan

pelayanan teknis administrasi Dinas; dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 160 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 470);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tujuan penyusunan Rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 adalah :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2025;
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan;
- 3) Menjadikan tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025.
- 5) Sebagai panduan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017

tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

<i>BAB I Pendahuluan</i>	Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung, latar belakang, landasan hukum penyusunan, Maksud dan tujuan dan sistematika penyusunan RENJA.
<i>BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022</i>	Menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
<i>BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah</i>	Menguraikan tentang Telahaan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD
<i>Bab IV Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah</i>	Menguraikan rencana kerja dan pendanaannya perangkat daerah dan perkiraan maju
<i>BAB V Penutup</i>	Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja tahunan



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung pada Tahun 2023 telah melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yaitu Bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian. Terhadap urusan tersebut akan evaluasi sebagai berikut;

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. PROGRAM: PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 196.060.500,- (98,48%);
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.242.699.945,- terealisasi sebesar Rp.14.722.083.629,- (80.70%);
- 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas berserta atribut dan kelengkapannya, Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 62.412.525,- terealisasi sebesar Rp. 62.271.000,- (99,77%);

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 495.856.758,- terealisasi sebesar Rp. 477.924.054,- (96,38%);
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perakatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.285.622,- terealisasi sebesar Rp. 77.496.320,- (98,99%);
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.108.033.220,- terealisasi sebesar Rp. 107.067.835,- (99,11%);
- d. Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.64.627.369,- terealisasi sebesar Rp. 64.325.935,- (99,53%);
- e. Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.68.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.400.000,- (100%);
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 138.558.220,- terealisasi sebesar Rp. 137.450.500,- (99,20%);
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 158.839.000,- terealisasi sebesar Rp. 151.511.465,- (95,39%).

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 43.300.000,- terealisasi sebesar Rp.40.803.236,- (94.23%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 750.448.800,- terealisasi sebesar Rp. 750.448.800,- (100%).

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak

dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 825.253.300,- terealisasi sebesar Rp. 730.491.800,- (88,52%);

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 101.517.140,- terealisasi sebesar Rp. 100.467.772,- (98.97%);
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp. 198.226.575,- terealisasi sebesar Rp. 198.140.550,- (96,96%).

B. PROGRAM: PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ada 4 sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.560.738.125,- terealisasi sebesar Rp. 1.551.285.563,- (99,39%);
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 932.022.100,- terealisasi sebesar Rp. 930.200.560,- (99,80%);
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.529.653.650,- terealisasi sebesar Rp. 3.478.041.411,- (98,54%);
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.703.862.330,- terealisasi sebesar Rp. 4.693.534.918,- (99,78%).

C. PROGRAM : PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu;

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.344.651.105,- terealisasi sebesar Rp. 4.319.193.452,- (99,41%).
2. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan ini terdiri dari 7 sub kegiatan, , yaitu:
 - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.400.430.624,- terealisasi sebesar Rp. 1.375.094.067,- (98.19%);
 - b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp.148.028.000,- terealisasi sebesar Rp.147.777.200,- (99,83%);
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi data dan Informasi Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 225.412.500,- terealisasi sebesar Rp. 225.378.900,- (99,99%);
 - d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.052.303.020,- terealisasi sebesar Rp. 1.050.628.100,- (99,84%);
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.491.557.500,- terealisasi sebesar Rp. 3.981.262.749,- (88.64%);
 - f. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas, Sub kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 154.842.400,- terealisasi sebesar Rp. 154.101.400,- (99,52%);
 - g. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 264.177.600,- terealisasi sebesar Rp. 262.819.170,- (99,49%).

D. PROGRAM : PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1.Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 3 sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.341.317.300,- terealisasi sebesar Rp. 2.339.905.470,- (99,94%);
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 203.120.000,- terealisasi sebesar Rp. 202.619.150,- (99,75%);
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah, Sub Kegiatan ini dengan pagu anggaran sebesar Rp. 476.560.000,- terealisasi sebesar Rp. 476.529.700,- (99,99%).

E. PROGRAM : PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan, yaitu;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Daerah, Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 276.096.370,- terealisasi sebesar Rp. 275.692.640,- (99,85%).

Dari hasil kinerja program dan kegiatan yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditentukan, terutama untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo.

Untuk lebih jelas dalam evaluasi pelaksanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outcome</i>)/Kegiatan (<i>Output</i>)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 (n-2)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2024(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
									Target Renja PD tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		4.0	3.98	3.35	3.98	118%	3.50	3.98	99,50

						Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	38.00	31.55	31,55	41.90	132.81	31.55	41.90	110.27
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Eveluasi dan Pengembangan	22,80	25,70	22,60	25,70	113,71	22,60	25.70	99.57
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	4,80	5,80	4,70	5,80	123,40	4,50	5.80	120.84
2	16	03	2,01		Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	03	2,01	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	- Jumlah lokasi dilengkapi wifi dan atau CCTV serta Jumlah interkoneksi antar Perangkat Daerah/Sekolah/puskemas	2704	2143	200	200	100	200	2.543,00	94,05
2	16	03	2,02		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	35	21	7	7	100	7	35,00	100,00
2	16	03	2,02	01	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan	- Jumlah server yang terintegrasi di Pemerintah Kota Bandung	204	150	34	34	100	34	218,00	106,86

					Pemerintah Daerah Kabupaten/kota									
2	16	03	2,02	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik	- Jumlah laporan Perencanaan TIK	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	03	2,02	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi elektronik	- Jumlah aplikasi yang diintegrasikan	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
2	16	03	2,02	07	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	- Jumlah aplikasi yang dikelola	25	15	5	5	100	5	25,00	100,00
2	16	03	2,02	08	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	- jumlah laporan hasil pengendalian dan pengembangan infrastruktur publik	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	03	2,02	09	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	- Jumlah laporan hasil evaluasi TIK	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	03	2,02	10	Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Jumlah dokumen pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota Bandung	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,9	2,70	3,50	3,90	111,43	3.90	6,79	174,04

2	20	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00
2	20	02.2	01	01	Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Jumlah publikasi data dan infografis	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	20	02.2	01	02	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	- Jumlah Data Terbuka Terstandar	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	20	02.2	01	06	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	- Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai Penerapan SPBE lingkup Persandian	1,37	1,20	1,20	1,20	100,00	1.37	2,47	180,10
2	21	02.2	01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	21	02.2	01	04	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah aplikasi yang diaudit keamanannya	50	37	7	10	142,86	7	54,00	108,00

2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	500	200	100	100	100	100	400,00	80,00
2	16	01.2	01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	2	1	1	100	1	4,00	100,00
2	16	01.2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan data/informasi Program/kegiatan Diskominfo	6	3	2	2	100	1	6,00	100,00
2	16	01.2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	1	1	1	100	1	3,00	60,00
2	16	01.2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	01.2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35	21	7	7	100	7	35,00	100,00
2	16	01.2	06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah laporan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor terdida	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	- Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Jumlah laporan bulanan Penyediaan ATK dan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00

2	16	01.2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetak dan pengandaan	20	16	2	2	100	2	20,00	100,00
2	16	01.2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah laporan bulanan penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	- Jumlah Laporan bulanan Penyediaan Makanan Dan Minuman Tamu	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	06	09	Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Jumlah Laporan bulanan Kegiatan Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	01.2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa pelayanan umum kantor	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00
2	16	01.2	09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah Unit Kendaraan Yang Dibayarkan Jasa pemeliharaan dan Perijinannya	140	106	28	28	100	28	162,00	115,71

2	16	01.2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah unit perbaikan peralatan kantor	60	36	12	12	100	12	60,00	100,00
2	16	01.2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara	5	3	1	1	100	1	5,00	100,00
2	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	2,20	2,00	2,00	2,00	100,00	2.20	1,37	62,08
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	99,43	100	99,43	99,43	100	99,62	99,62
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,6	0,5	0,5	0,5	100,00	0,6	0,53	88,89
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,31	82,35	85	85	100,00	88,31	85,22	96,50
2	16	02	01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub kegiatan pengelolaan dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
2	16	02	01	02	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	- Jumlah layanan penyuluhan dan pengendalian informasi	15	9	3	3	100	3	15,00	100,00
2	16	02	01	05	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Jumlah Studio Radio yang dikelola	10	6	2	2	100	2	10,00	100,00
2	16	02	01	06	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	- Jumlah layanan informasi publik	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00

2	16	02	01	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	- Jumlah sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat, Mitra dan Relawan	20	12	4	4	100	4	20,00	100,00
---	----	----	----	----	---	---	----	----	---	---	-----	---	-------	--------

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target. Ada 4 indikator Indikator Kinerja Utama, Pada Tahun 2022 dari 4 indikator ini ada 1 indikator yang melebihi target yaitu; Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 3 indikator yang sesuai target yaitu; Prosentase data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka; Prosentase Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Untuk Tahun 2022 dari target 4 indikator ini diharapkan dapat terealisasi sesuai dengan target, sedangkan proyeksi tahun 2023 yang merupakan akhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diproyeksikan juga optimis dapat terealisasi dengan baik.

Analisis Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung yaitu ada 8 indikator yang terdiri dari 3 urusan, yaitu;

1. Urusan Komunikasi dan Informatika ada 5 indikator, namun sesuai dengan urusannya Dinas Komunikasi dan Informatika hanya memiliki kewenangan 1 indikator saja yaitu Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan, sedangkan 4 indikator lagi kewenangannya ada pada Kantor BPS Kota Bandung.

Pada tahun 2019 BPS Kota Bandung tidak mensurvei sesuai dengan indikator tersebut sehingga tidak ada data yang dapat disajikan pada IKK ini.

Urusan Statistik ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Urusan Persandian ada ada 2 indikator, kesemuanya dapat terealisasi sesuai dengan target.

Untuk lebih jelas dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini;

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bandung

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (Thn n-2)	Tahun 2023 (Thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			3,30	3,35	3,30	3,35	3,98	NA	3,35	3,7	IKU 2019-2023 dan IKU 2024-2026
2	Jumlah data yang disampaikan kepada masyarakat secara terbuka			65%	75%	65%	75%	75,35%	NA	NA	NA	Tidak menjadi IKU 2024-2026
3	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan persandian yang terkendali			93,75%	100%	93,75%	100%	100%	NA	NA	NA	Tidak menjadi IKU 2024-2026

4	Indeks Kepuasan Masyarakat			85	88,31	85	88,31	91.07%	NA	88,40	88,50	IKU 2019-2023 dan IKU 2024-2026
			Indikator Kinerja Kunci Kota Bandung									
1			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat Kecamatan	100	100	100	100	100%	100%	100	100	
2			Cakupan Layanan Telekomunikasi	90.00	95.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Kantor BPS Kota Bandung tidak lagi mendata layanan telekomunikasi
3			Prosentase penduduk yang menggunakan HP/telephon	92.05	93.89	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
4			Proporsi rumah tangga dengan akses internet	95.03	95.22	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
5			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	21.39	20	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

6			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
7			Data Basis Pembangunan Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
8			Prosentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat daerah	93,75	100%	100%	100%	62,50	NA	100%	100%	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung masih keterkaitan dengan baik dengan tingkat provinsi atau kabupaten dan kota lain maupun tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

Keterkaitan ini menjadi peluang eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan kinerja pembangunan, yaitu;

1. Adanya aturan UU tentang keterbukaan informasi publik;
2. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat;
3. Kota Bandung yang strategis sebagai pusat kegiatan pendidikan, bisnis dan pusat pemerintahan Jawa Barat;
4. Meningkatnya jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi serta standarisasi aplikasi di Pemkot Bandung;
5. Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat dan Instansi Pemerintah lain;
6. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan serta peran serta masyarakat yang dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi;
7. Adanya komitmen pimpinan dan jajaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

Sedangkan tantangan atau ancaman eksternal yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan kinerja pembangunan ini, yaitu.

1. Pelaksanaan Bandung Smart City secara eksternal belum didukung maksimal;
2. Belum semua kinerja pelayanan publik sesuai harapan;
3. Belum adanya standarisasi aplikasi integrasi;
4. Tingkat literasi internet belum merata;
5. Belum optimalnya keamanan data;
6. Kemampuan Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah masih perlu ditingkatkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan Renja PD. Rancangan Renja PD merupakan kebijakan Top Down Planning yaitu kebijakan yang harus mengikuti arah kebijakan dari pusat dan juga harus melaksanakan Up Down Planning yaitu harus mengadopsi usulan dari masyarakat sehingga PD nantinya menyelaraskan antara usulan dari bawah dan menyelaraskannya dengan kebijakan dari atas. Berdasarkan Perda No. 5 tahun 2009 usulan hasil Musrenbang dan reses Dewan harus bisa diakomodir minimal sebesar 30%.

Untuk lebih jelas review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Bandung dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini;

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bandung

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				34.486.193.955	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				46.011.359.527
A	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bandung		100%	33.300.493.955	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Bandung		100%	43.461.359.527
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Sub Kegiatan	21.678.111.054	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Sub Kegiatan	23.576.359.527
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000
01	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	200.000.000
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	77 orang	17.622.187.997	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	77 orang	17.622.187.997

02	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Sub Kegiatan	17.622.187.997	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Sub Kegiatan	17.622.187.997
3	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	1 paket	-	Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	1 paket	190.000.000
03	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Sub Kegiatan		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Sub Kegiatan	190.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1.257.700.329	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Paket	1.467.357.850
04	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	68.008.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	3 Paket	88.284.920
05	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	74.187.892	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	118.836.540
06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	148.082.707	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	2 paket	219.214.890
07	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	96.922.500	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang Disediakan	12 Dokumen	76.890.000

08	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	126.108.960	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	12 laporam	139.131.500
09	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	309.422.270	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan fasilitas kunjungan Tamu	12 laporam	325.000.000
10	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Sub Kegiatan	434.968.000	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Sub Kegiatan	500.000.000
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporam	1.723.082.128	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporam	2.576.813.680
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	64.780.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporam	826.813.680
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	2 Sub Kegiatan	1.658.302.128	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	2 Sub Kegiatan	1.750.000.000
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Unit	1.075.140.600	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29 Unit	1.520.000.000
13	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	12 laporam	905.144.100	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	12 laporam	1.100.000.000

14	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	169.996.500	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	220.000.000
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	200.000.000
II	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3,0	4.879.066.700	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	3,0	8.420.000.000
			Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%				Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	100%	
			Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	662.022.100			Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	0,4	2.100.000.000
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,50				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	88,50	
7	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	92%	5.541.088.800	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	92%	1.166.811.938
16	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	2.008.458.700	Relasi Media		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	4 Laporan	5.000.000.000

17	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	146.608.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	150.000.000
18	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	843.000.000	Pelayanan Informasi Publik		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5 permohonan	950.000.000
19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	524.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	3 Rekomendasi	900.000.000
20	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	662.022.100	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 media	2.100.000.000
21	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	1.086.000.000	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik		Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	10 dokumen	1.100.000.000
22	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	61.200.000	Penyusunan Konten		Jumlah Konten Informasi Publik	12 konten	70.000.000
23	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	300 orang	209.800.000	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	300 orang	250.000.000

III	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	10,00	1.085.233.300	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	10,00	1.665.000.000
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	16,20	800.000.000			Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan	16,20	1.200.000.000
			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	10,00	4.196.060.801			Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	10,00	6.500.000.000
8	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	94 Aplikasi	6.081.294.101	Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	94 Aplikasi	9.365.000.000
24	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	788.900.000	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional		Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	35 Aplikasi	1.500.000.000
25	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	200.000.000	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah		Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen	400.000.000
26	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	250.000.000	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	1 dokumen	300.000.000
27	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	837.513.300	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	5 Aplikasi	1.115.000.000

28	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	247.720.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	4 aplikasi	550.000.000
29	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 kegiatan	350.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas		Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	2 kegiatan	500.000.000
30	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	532.160.801	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	200 PD	1.500.000.000
31	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	2.875.000.000	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	200 PD	3.500.000.000
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	5,80	800.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	5,80	1.650.000.000
9	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	800.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	100%	1.650.000.000

32	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	250.627.600	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional		Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	900.000.000
33	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	292.952.300	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	400.000.000
34	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	256.420.100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 dokumen	350.000.000
C	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,70	385.700.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	3,70	900.000.000
10	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	10 Aplikasi	385.700.000	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	10 Aplikasi	900.000.000
35	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Aplikasi	385.700.000	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Aplikasi	900.000.000

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika 2024-2026

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui kegiatan Musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota, PD akan menyerap aspirasi dari masyarakat. Usulan masyarakat sebagian besar umumnya mengajukan usulan mengenai perbaikan sarana prasarana jalan tetapi ada juga sebagian lagi yang mengusulkan kegiatan pada PD teknis yang pada garis besarnya meminta bantuan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan usaha.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung menanggapi usulan masyarakat terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang dan akan mengakomodir sepanjang sesuai dengan tupoksi Dinas. Usulan-usulan dari hasil Musrenbang akan ditelaah lebih lanjut dengan melakukan klarifikasi ke lokasi yang meminta bantuan bila sesuai dengan kriteria yang dimiliki Dinas maka akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Kota Bandung Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika tidak ada usulan-usulan dari Musrenbang Tingkat Kecamatan.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

5.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya menyelaraskan tugas dan fungsi sesuai dengan urusannya.

Ada beberapa kebijakan nasional pada Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan urusannya yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika; Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (TIK) dan penyiaran melalui transformasi digital.
2. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dengan strategi:
 - a. Penguatan integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik sesuai dengan asas-asas keterbukaan informasi publik.
 - b. Penguatan media-media lokal dan alternative sebagai sumber informasi utama masyarakat,
 - c. Penyediaan konten informasi publik yang berkualitas dan merata, terutama bagi masyarakat di wilayah 3T,
 - d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bidang komunikasi dan informasi,

- e. Peningkatan akses partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik secara langsung dan digital,
- f. Peningkatan literasi media masyarakat melalui pendidikan dan pendektan sosial budaya,
- g. Penyusunan standarisasi lembaga pers dan jurnalis,
- h. Peningkatan kualitas isi siaran TV melalui pembentukan rating nasional serta penguatan peran KPI;

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1. Pengembangan e-Government di lingkup Pemerintah daerah.
- 2. Pembinaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Daerah.
- 3. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah.

TUJUAN/SASARAN

- 1. Kualitas akses TIK yang merata dengan pemanfaatan yang optimal.
- 2. Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif dan partisipatif.

Untuk mendukung kebijakan nasional, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung disesuaikan dengan program/kegiatan yang ada dengan memperhatikan acuan yang telah ditentukan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 sesuai amanat Permendagri Nomor 15 tahun 2024, yaitu;

- 1. Dalam mendukung prioritas nasional kelima yaitu stabilitas keamanan nasional guna meningkatkan akses dan kualitas informasi publik, perlu adanya upaya penatalaksanaan bidang komunikasi publik, penyediaan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pengelolaan informasi publik melalui media Pemerintah.
- 2. Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional tersebut, arah dan kebijakan pembangunan daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia bidang Komunikasi di Pemerintah daerah, peningkatan penyebaran informasi publik yang berkualitas melalui media cetak, media elektronik, media luar ruang, media tatap

muka, pertunjukan rakyat, internet, kemitraan dengan komunitas informasi dan komunikasi publik serta media yang dimiliki Pemerintah daerah. Dengan ini maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 Pemerintah daerah perlu memperhatikan isu-isu sebagai berikut:

- a. Penyebaran informasi pencegahan stunting. Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. Penguatan karakter kebangsaan; dan
 - c. Deradikalisasi.
3. Dalam melaksanakan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemerintah daerah memperhatikan:
- a. Seluruh anggaran belanja TIK di lingkungan Pemerintah daerah agar berada di satu rekening dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
 - b. Infrastruktur TIK yang terintegrasi, seperti server pengolah data dan jaringan komunikasi data.
 - c. Selama belum ada kebijakan yang mengatur, pembangunan aplikasi umum di Pemerintah daerah agar menggunakan atau mengadopsi aplikasi serupa yang sudah digunakan di pusat atau daerah lain.
 - d. Integrasi data di lingkungan Pemerintah daerah di bawah koordinasi dinas yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika untuk dapat diakses secara berbagi pakai oleh seluruh SKPD; dan
 - e. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia bidang TIK di lingkungan Pemerintah daerah baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. URUSAN STATISTIK

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Pembangunan Manusia. Guna Mendukung Dimensi Pembangunan Manusia, BPS akan melaksanakan Sensus Penduduk 2020 dengan fokus pembangunan: Satu data kependudukan Indonesia

TUJUAN/SASARAN

Menyediakan data penduduk dan perumahan yang mencakup jumlah,

distribusi, komposisi, dan karakteristiknya, serta^[L]_[SEP]menjadi menuju satu data kependudukan Indonesia

C. URUSAN PERSANDIAN

PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN NASIONAL

Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik Hal ini diwujudkan dengan:

- 1. Pembangunan dan Penguatan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);
- 2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Keamanan Siber.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pelaksanaan urusan Pemerintah daerah Bidang persandian meliputi:

- 1. Penyelenggaran persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Yang dilaksanakan melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi^[L]_[SEP]
 - b. Pengelolaan sumber daya^[L]_[SEP] keamanan informasi^[L]_[SEP]
 - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik
 - d. Penyediaan layanan keamanan informasi

TUJUAN/SASARAN

Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional dengan indikatornya adalah Meningkatnya skor Indonesia dalam *Global Cybersecurity Index*.

Keselarasan kinerja untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan

beberapa program dan kegiatannya yaitu;

1. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan penguatan *incident response team* sektor pemerintah adalah sebagai berikut:
2. Dukungan Formasi Sumber Daya Manusia yang akan ditunjuk bertugas dalam CSIRT: khusus menjalankan fungsi CSIRT (*dedicated*); atau mendelegasikan staf yang menjadi admin TI.
3. Dukungan APBD untuk Jaldis mengikuti pelatihan, FGD, asistensi pembentukan CSIRT, dan/atau *Drill Test* di pusat. ^[L]_[SEP]
4. Dukungan dokumen waktu, dan tempat untuk asistensi pembentukan CSIRT sektoral di lingkungan pemerintah daerah. ^[L]_[SEP]
5. Dukungan ketetapan dalam Peraturan Gubernur tentang kebijakan tata kelola CSIRT, SOP operasional CSIRT, susunan tim CSIRT, dan layanan CSIRT yang ^[L]_[SEP]dinyatakan dalam RFC 2350, berikut dukungan anggaran operasional CSIRT dan honorarium Tim CSIRT dan lain-lain.

5.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan sasaran dan target kinerja Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026.

Adapun Tujuan dan Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 memiliki target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
Sebelum Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	REALISASI	TARGET	
			2023	2024	2025
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/Smart City)	A	B	B
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,98	Sangat Baik (3,50)	Sangat Baik (3,70)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.07	88,40	88,50

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.2

**Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025
Sesudah Revisi**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASA RAN	REALISASI		TARGET
			2023	2024	2025
1	Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	A	A	A
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkup Kewenangan Diskominfo	3,98	4,59 (Memuaskan)	4.77 (Memuaskan)
1.2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Diskominfo	Indeks Kepuasan Masyarakat	91.07	95,89	88,50

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IV

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Tahun 2025 dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah yang telah dituangkan dalam RPD Kota Bandung Tahun 2024-2026, namun pada Tahun 2025 ini ada penyelarasan nomenklatur ke empat dari Kementerian Dalam Negeri pada sub kegiatan yaitu;

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - c.Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
- g. Sub Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 1. Kegiatan Penyampaian Komunikasi dan Informasi Publik
 - a. Sub Kegiatan Relasi Media;
 - b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
 - c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik;
 - e. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
 - f. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik;
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Konten;
 - h. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

- 1. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;

- b. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau rewiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah;
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas;
- g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota;
- h. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE.

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota;
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional ;
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
 - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026, maka dapat di lihat pada Tabel 5 di bawah ini;

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Bandung

DINAS KOMINIKASI DAN INFORMATIKA

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Pagu Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR								
2	16				URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	16	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Sub Kegiatan		APBD		1 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan		APBD		1 Laporan	200.000.000
2	16	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah sub kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Laporan		APBD		1 Laporan	
2	16	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	77 orang	17.622.187.997	APBD		77 orang	19.384.406.797

2	16	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah	Kota Bandung	1 Sub Kegiatan		APBD		1 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Bandung	1 paket		APBD		1 paket	190.000.000
2	16	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	7 Sub Kegiatan		APBD		7 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.06	02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kartor yang disediakan	Kota Bandung	Paket	280.658.565	APBD		Paket	308.724.422
2	16	01	2.06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	86.834.288	APBD		3 Paket	95.517.717
2	16	00	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yan disediakan	Kota Bandung	3 Paket		APBD		3 Paket	164.393.086
2	16	00	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	2 paket	22.667.693	APBD		2 paket	24.934.462
2	16	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	Kota Bandung	12 Dokumen	126.108.960	APBD		12 Dokumen	138.719.856
2	16	01	2.06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan Tamu	Kota Bandung	12 laporam	337.425.848	APBD		12 laporam	371.168.433
2	16	01	2.06	09	Sub Kegiatan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 laporam	268.276.000	APBD		12 laporam	295.103.600
2	16	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sub Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	2 Sub Kegiatan		APBD		2 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 laporam	45.100.000	APBD		12 laporam	49.610.000

2	16	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan layanan kebersihan dan keamanan kantor	Kota Bandung	12 laporam	2.122.390.923	APBD		12 laporam	2.334.630.015
2	16	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	2 Sub Kegiatan		APBD		3 Sub Kegiatan	
2	16	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kota Bandung	29 Unit	1.000.299.600	APBD		29 Unit	1.100.329.560
2	16	01	2.09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Bandung	12 laporam	170.970.000	APBD		12 laporam	188.067.000
2	16	01	2.09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Bandung	1 Unit		APBD		1 Unit	200.000.000
							Kota Bandung			APBD			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Layanan Informasi	Kota Bandung	3.00		APBD		3.00	
						Cakupan pengaduan masyarakat melalui LAPOR yang ditindaklanjuti	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
						Nilai layanan informasi masyarakat melalui radio	Kota Bandung	0,4		APBD		0,4	
						Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Radio Sonata	Kota Bandung	88,50		APBD		88,60	
2	16	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan Keterbukaan Informasi Publik	Kota Bandung	92%		APBD		92%	

2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Bandung	4 Laporan	3.548.458.700	APBD		4 Laporan	3.903.304.570
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kota Bandung	1 Komunitas	156.608.000	APBD		1 Komunitas	172.268.800
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Kota Bandung	5 permohonan	1.043.000.000	APBD		5 permohonan	1.147.300.000
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Bandung	3 Rekomendasi	524.000.000	APBD		3 Rekomendasi	576.400.000
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Bandung	1 media	941.722.100			1 media	1.035.894.310
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Kota Bandung	10 dokumen	1.086.000.000			10 dokumen	1.194.600.000
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kota Bandung	12 konten	61.200.000			12 konten	67.320.000
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Kota Bandung	300 orang	209.800.000			300 orang	230.780.000
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Penerapan SPBE lingkup Aplikasi	Kota Bandung	10.00		APBD		38,00	

						Nilai Penerapan SPBE lingkup Perencanaan, Evalueasi dan Pengembangan	Kota Bandung	16.20		APBD		22,80	
						Nilai Penerapan SPBE lingkup Infrastruktur	Kota Bandung	10.00		APBD		4,80	
2	16	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah yang terintegrasi	Kota Bandung	94 Aplikasi		APBD		94 Aplikasi	
2	16	03	2.02	13			Kota Bandung	35 Aplikasi	3.761.378.000	APBD		35 Aplikasi	4.137.515.800
2	16	03	2.02	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Kota Bandung	2 Dokumen		APBD		2 Dokumen	354.895.200
2	16	03	2.02	19	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Kota Bandung	1 dokumen	327.368.000	APBD		1 dokumen	360.104.800
2	16	03	2.02	20	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Kota Bandung	5 Aplikasi		APBD		5 Aplikasi	1.122.521.290
2	16	03	2.02	21	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	4 aplikasi	277.772.580	APBD		4 aplikasi	305.549.838
2	16	03	2.02	23	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Kota Bandung	2 kegiatan		APBD		2 kegiatan	550.000.000

2	16	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bandung	200 PD	532.160.801	APBD		200 PD	585.376.881
2	16	03	2.02	30	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Kota Bandung	200 PD	2.875.000.000	APBD		200 PD	3.162.500.000
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					APBD			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	5,80		APBD		5,80	
2	20	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan data sektoral yang tersedia pada Portal Data sesuai dengan standar data	Kota Bandung	100%		APBD		100%	
2	20	02	2.01	0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Bandung	100%	250.627.600	APBD		100%	275.690.360
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Bandung	100%	492.952.300	APBD		100%	542.247.530
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Bandung	1 dokumen	256.420.100	APBD		1 dokumen	282.062.110
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					APBD			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Nilai Penerapan SPBE lingkup Data dan Statistik	Kota Bandung	3,70		APBD		3,70	

					PENGAMANAN INFORMASI								
2	21	02	2.01		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang terkendali keamanannya	Kota Bandung	10 Aplikasi		APBD		10 Aplikasi	
2	21	02	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Kota Bandung	10 Aplikasi	415.700.000	APBD		10 Aplikasi	457.270.000
					JUMLAH				40.686.193.955				45.509.206.437

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika



BAB IV PENUTUP

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 merupakan bentuk penjabaran tahunan dari Rencana Strategis 2024 – 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung khususnya Urusan Komunikasi dan Informatika dan memantapkan tatakelola pemerintah daerah yang baik. Rencana Kerja ini disusun untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis beserta target yang ingin dicapai.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Tahun 2025 disusun dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya masih harus sering dievaluasi. Diharapkan dengan evaluasi yang terus berjalan secara sistematis. Seluruh jajaran Diskominfo dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan Diskominfo Kota Bandung merupakan aset yang berharga bagi terlaksananya otonomi daerah.

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Tahunan ini maka Diskominfo Kota Bandung harus segera melakukan peningkatan kualitas SDM bidang Informasi dan Komunikasi karena Dinas Komunikasi dan Komunikasi merupakan pintu gerbang Informasi Pemerintah Kota Bandung dengan senantiasa menyediakan Informasi yang dibutuhkan masyarakat baik

yang berskala lokal, regional dan nasional juga sebagai Dinas yang menjalin Komunikasi timbak balik yang seimbang, aspiratif dan efektif sesuai dengan paradigma baru yang ada.

Adanya Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memacu kinerja aparat sehingga tercipta hasil kerja yang optimal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bandung, 21 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

(YAYAN AHMAD BRILYANA, S.Sos.M.Si)
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197311271993031003